

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPAN WIRAUUSAHA (PKW) DI PKBM HARAPAN BANGSA I
KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

Julian Fajri

NPM. 1541020049

Pengembangan Masyarakat Islam

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441 H/2020 M**

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW) DI PKBM HARAPAN BANGSA I
KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapat Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Dakwah

Oleh

Julian Fajri

NPM. 1541020049

Pengembangan Masyarakat Islam

Pembimbing I : Dr. H. Saifuddin, M.Pd
Pembimbing II : H. Zamhariri, S.Ag M.Sos.I

**FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
TAHUN 1441 H/2020 M**

ABSTRAK

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW) DI PKBM HARAPAN BANGSA I KELURAHAN SEMBEREJO KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG

Oleh

Julian Fajri

Pelatihan kewirausahaan merupakan suatu langkah penting dan perlu dilakukan dalam rangka membentuk/mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu lembaga keswadayaan yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa I yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling. PKBM ini memiliki beberapa macam program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), tujuan dari kegiatan ini memberikan penyuluhan dan pelatihan dengan metode pendidikan orang dewasa (*andragogi*) kepada para peserta pengembangan *life skills*.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PKW di PKBM Harapan Bangsa I Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran data lengkap yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menentukan sampel, menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun kriteria yang penulis berikan maka sampel berjumlah 10 orang. Dalam pengumpulan data, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan potensi serta mencetak sumber daya yang berkualitas melalui tiga tahapan yaitu: tahap sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus PKBM Harapan Bangsa I melalui pengenalan tentang program PKW. Tahap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan adalah melalui pengembangan *life skills* dalam bentuk pelatihan menjahit. Tahap monitoring dan evaluasi melalui pendampingan yang terus dilakukan oleh pihak penyelenggara program PKW.

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha(PKW)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : **JULIAN FAJRI**

NPM : **1541020049**

Jurusan : **Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)**

Fakultas : **Dakwah dan Ilmu Komunikasi**

Judul Skripsi : **Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Kecakapan Wirausaha (PKW) di PKBM Harapan Bangsa I Kecamatan Kemiling Bandar Lampung**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosyah Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Saifuddin, M.Pd


H. Zamhariri, S.Ag, M.Sos.I

NIP. 196202251990011000

NIP. 197306012003121002

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam**


Dr. H. Mawardi, J. M.Si

NIP. 197112152007012002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

**Skripsi dengan judul : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW) DI PKBM HARAPAN
BANGSA I KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG.**

**Disusun oleh : JULIAN FAJRI, NPM : 1541020049, Jurusan Pengembangan
Masyarakat Islam (PMI), telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Dakwah dan Ilmu Komunikasi pada hari Rabu tanggal 15 April 2020.**

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. H. Mawardi J, M.Si

Sekretaris : Fiqih Satria, S.Kom., M.T.I

Penguji I : Dr. Faizal, S.Ag., M.Ag

Penguji II : Dr. H. Saifuddin, M.Pd

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi



**Prof. Dr. H. Khomsarial Romli, M.Si
NIP. 196104091990031002**

MOTTO

وَمَا ۖ مُتَّفَرِّقَةً أَبْوَابٍ مِنْ ۖ وَادْخُلُوا ۖ وَاحِدٍ بَابٍ مِنْ ۖ تَدْخُلُوا ۖ لَا بَنِيَّ يَا وَقَالَ
تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ ۖ لِلَّهِ ۖ إِلَّا الْحُكْمُ ۖ إِنَّ ۖ شَيْءٍ مِنْ ۖ اللَّهِ ۖ مِنْ ۖ عَنْكُمْ أُعْنِي
الْمُتَوَكِّلُونَ فَلْيَتَوَكَّلِ وَعَلَيْهِ

Dan Ya'qub berkata: "Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikitpun dari pada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah; kepada-Nyalah aku bertawakkal dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakkal berserah diri".

(Q.S Yusuf 12:67)

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan sebagai wujud ungkapan terima kasih yang mendalam kepada :

1. Abiku tercinta DR.HM.Azaddin M.Pd Dan Umiku tersayang Hj. Rukayah.
Atas pengorbanan selama ini mulai dari kecil hingga beranjak dewasa sampai hari ini. Berkat do'a dan bantuan materil yang yang diberikan selama kuliah ini sehingga penulis bisa menyelesaikan diwaktu yang tepat.
2. Kakak-kakak ku Dang Alam beserta istri, Donga Rahmat beserta istri, Doci Hidayat beserta istri, dan adikku tersayang Ahmad Muhajir yang telah mensupport baik moril dan materil.
3. Sahabat hati Nuning Fitri Astari S.Pd yang telah ikhlas menemani disetiap perjuangan penulis.
4. Kanda dan yunda di Himpunan Mahasiswa Islam(HMI) Cabang Bandar Lampung Komisariat Dakwah
5. Keluarga Besar Rumah Da'i
6. Saudara tak sedarah (NGARTOY) salurku Viko,Ucup,Klimis,Soreh, Nawaw, oby doyo, mas pepi, sewo, dan Redyvan marlo,Hepta.
7. Saudara pejuang wisuda Husnul Fadli S.Sos , Joty Pratama S.Sos , Yogia Aliyekti, Solhan Effendi dan Aldy
8. Adinda ku andre, ammar, oky, icas, rangga, doni, risky, ical, alissa, septi, hani, ade, yusa, diah, ayu, lintang, aprillia, devi, ratna dzakiyyah dll

9. Teman seperjuangan jurusan PMI angkatan 2015. Terima kasih atas dukungan kalian.
10. Almamater tercinta Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah menjadi sarana menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Julian Fajri, dilahirkan di Bengkulu pada tanggal 10 Juli 1997, anak keempat dari lima bersaudara. Lahir dari pasangan Ibu Rukayah dan Bapak DR. Azaddin Abu Bakar. Adapun riwayat pendidikan yang telah ditempuh oleh penulis adalah:

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Langkapura Bandar Lampung lulus pada tahun 2009.
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 14 Bandar Lampung lulus pada tahun 2012.
3. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2015.
4. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke program S1 di UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam.

Selama menjadi mahasiswa penulis aktif dalam kegiatan organisasi di lingkungan kampus yaitu, Rumah Da'i dan Himpunan Mahasiswa Islam. Penulis juga pernah menjadi Ketua Umum Rumah Da'i tahun 2017-2018 dan sekarang Penulis sedang menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bandar Lampung Komiseriat Dakwah UIN RIL 2019-2020.

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah SWT yang telah mengajarkan manusia untuk selalu menggali ilmu Agama dan pengetahuan. Dengan rahmat-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Skripsi Tentang “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di PKBM Harapan Bangsa I Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung”. Sholawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada sang tauladan sejati, pembawa risalah yaitu Rasulullah Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Sahabat dan Umatnya.

Penulis menyadari bahwa dalam upaya penyelesaian penulisan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khomsahrial Romli, M.Si selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN RadenIntan Lampung.
2. Bapak Dr. H. Mawardi J, M.Si, Selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam serta Bapak H. Zamhariri, S.Ag M.Sos.I selaku Sekertaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK) UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. Saifuddin, M.Pd, selaku Pembimbing I dan Bapak Zamhari,S.Ag M.Sos.I selaku Pembimbing II yang telah sabar memberikan bantuan, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah memberikan ilmu dan arahan pada penulis.
6. Pihak perpustakaan Pusat dan juga Perpustakaan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang telah menyediakan buku-buku referensi
7. Ketua PKBM Harapan Bangsa I Ibu Tarekah, M.M dan Bapak Sujar yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas dan bimbingan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.
8. Para peserta PKBM Harapan Bangsa I Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung

Akhirnya ungkapan Do'a terucap dengan ikhlas, dan mudah-mudahan seluruh jasa baik moral maupun material berbagai pihak, dinilai baik dan membuahkan pahala disisi Allah SWT.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang	5
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Metodologi Penelitian	13

BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PKW

A. Pemberdayaan Masyarakat	20
1. Pengertian Pemberdayaan.....	20
2. Tujuan Pemberdayaan	24
3. Tahapan Pemberdayaan	27
4. Strategi Pemberdayaan	32
B. Pendidikan <i>Life Skills</i> dalam Dimensi Kewirausahaan	36
1. Pengertian <i>Life Skills</i>	36
2. Pendidikan Kewirausahaan pada Lembaga Kursus	37
C. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)	41
1. Pengertian PKBM.....	41
2. Konsep PKBM.....	43
3. Tujuan dan Tugas PKBM	46
4. Fungsi PKBM	47
D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM	51
E. Teori <i>Behavioristik</i>	56

BAB III DESKRIPSI PKBM HARAPAN BANGSA I DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PKW

A. Gambaran Umum PKBM Harapan Bangsa I	60
1. Sejarah Berdirinya PKBM Harapan Bangsa I	60
2. Visi dan Misi PKBM Harapan Bangsa I	62
3. Tujuan dan Program PKBM Harapan Bangsa I	63
4. Struktur Organisasi PKBM Harapan Bangsa I	64
B. Pemberdayaan Masyarakat di PKBM Harapan Bangsa I Melalui Program PKW	65
1. Pendidikan Kecakapan Wirausaha	65
a. Pengertian	65
b. Tujuan	65
c. Sasaran	65
2. Pemberdayaan Masyarakat di PKBM Harapan Bangsa I Melalui Program PKW	66
a. Sosialisasi Program PKW	67
b. Proses Pemberdayaan (Pelatihan Menjahit)	68
c. Tahap Pendayaan (Merintis Usaha)	75

BAB IV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PKW DI PKBM HARAPAN BANGSA I

A. Pemberdayaan Masyarakat melalui Program PKW	77
--	----

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	90
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Program Pendidikan Masyarakat yang dilaksanakan.....	63
2. Jadwal Pembelajaran PKW Menjahit PKBM Harapan Bangsa I.....	70

DAFTAR BAGAN

	Halaman
1. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	29
2. Pola Pendidikan Kewirausahaan Terintegrasi.....	38
3. Pola Pendidikan Kewirausahaan Terpisah.....	39
4. Struktur Organisasi PKBM Harapan Bangsa I.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menjelaskan secara keseluruhan isi skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi yang penulis teliti ini. Adapun judul skripsi ini adalah **“PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW) DI PKBM HARAPAN BANGSA I KELURAHAN SUMBEREJO KECAMATAN KEMILING BANDAR LAMPUNG”**.

Pemberdayaan menurut Mas’oed diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat.¹ Meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik dan sejahtera merupakan tujuan dari apapun profesi kita.

Pemberdayaan Juga diartikan sebagai suatu upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat dan kemampuan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.²

¹ Aprillia, Theresia, NTP dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. (Surakarta: Alfabeta, 2014). h. 115.

²Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam Malang *“Pemberdayaan Masyarakat Pendekatan RRA dan PRA”*(2009). h.17

Menurut Sunardiningrat (2002) berpendapat bahwa pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar, hingga mencapai status mandiri. Proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat berlangsung secara bertahap, yaitu :

1. Tahap penyadaran dan pembentukan prilaku menuju perilaku sadar dan peduli, sehingga yang bersangkutan merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
2. Tahap Transformasi kemampuan berupa wawasan berpikir atau pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar dapat mengambil peran didalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga berbentuk inisiatif, kreatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.³

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan Pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Pendidikan kecakapan kewirausahaan diselenggarakan menggunakan pendekatan 4 in 1 sebagai berikut:

1. Identifikasi peluang usaha
2. Pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan
3. Pendampingan dan perintisan usaha.⁴

³Karya Sobahi. Cucu, Suhana "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah." (Bandung: Cakra, 2011). h. 109

Dengan demikian Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan program yang di buat oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan memberdayakan masyarakat dengan memberi pelatihan keterampilan agar menambah bekal pengetahuan, dan sikap berwirausaha sesuai dengan kebutuhan dan peluang usaha.

PKBM pada dasarnya merupakan tempat dimana masyarakat dapat mengikuti program kegiatan belajar yang mandiri melalui penguatan pemberdayaan pendidikan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional yang menetapkan PKBM sebagai salah satu pendidikan non formal⁵. Makna dasar pusat kegiatan belajar masyarakat adalah pemusatan manajemen dalam hal mencari solusi dalam pemberdayaan sumber daya, yang diselenggarakan dengan latar belakang pembelajaran sehingga output yang dihasilkan dari kegiatan pembelajaran ini berdampak pada peningkatan soft skill dan hard skill. Dengan demikian diharapkan warga belajar yang menjadikan PKBM sebagai alternatif, mempunyai kesetaraan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh masyarakat dari pendidikan formal.

Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi dan mengajarkan pada warga belajarnya untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan agar bermanfaat bagi mereka dan juga untuk orang lain, yaitu

⁴Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), (Jakarta:Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. h.5

⁵ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui bahwa PKBM adalah Satuan Pendidikan Non Formal.

berbagai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan ilmu-ilmu penunjang kecakapan hidup, serta memberikan motivasi untuk mandiri dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Keterbatasan ekonomi, waktu, usia, kebutuhan hidup, masalah jarak, kebutuhan dunia kerja merupakan beberapa sebab hadirnya lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat sebagai pendidikan non formal. Selain memfasilitasi dan memberikan pembelajaran,

Menurut Sudjana, PKBM mempunyai tugas: (a) memberikan pembelajaran kepada peserta belajar untuk meningkatkan ketrampilan, kemampuan berkomunikasi maupun beradaptasi dengan perubahan lingkungan di masa mendatang, serta kecakapan dalam menyelesaikan permasalahan hidup, (b) pemberdayaan peserta belajar agar mampu merubah barang yang sudah tidak mempunyai nilai ekonomis menjadi bernilai guna dan bernilai ekonomis.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di PKBM Harapan Bangsa I adalah suatu penelitian tentang bagaimana proses pemberdayaan untuk mengoptimalkan potensi dan keterampilan masyarakat serta pemberian modal usaha untuk lebih memotivasi masyarakat dalam meningkatkan pendapatan ekonomi, serta taraf kehidupan yang lebih sejahtera serta diridhai Allah SWT.

B. Alasan Memilih Judul

Berdasarkan penegasan judul diatas yang menjadi alasan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu ikhtiar/usaha yang terstruktur, sistematis dan masif untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih sejahtera dan *sustainable* (berkelanjutan) melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
2. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) merupakan layanan pendidikan kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha.
3. Tersedianya data-data yang cukup serta lokasi PKBM yang terjangkau sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktu yang tepat.

C. Latar Belakang Masalah

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang

diikat oleh kesamaan.⁶ Dengan adanya kemajuan jaman banyaknya permasalahan yang terjadi pada masyarakat, salah satu masalah terbesarnya adalah masalah ekonomi. Tidak meratanya pendapatan dan pengeluaran membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang menyebabkan masyarakat banyak yang miskin.

Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belenggu penjajahan yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan. Kemiskinan seharusnya menjadi masalah bersama yang harus ditanggulangi secara serius, kemiskinan bukanlah masalah pribadi, golongan bahkan pemerintah saja, akan tetapi hal ini merupakan masalah setiap kita warga negara Indonesia. Kepedulian dan kesadaran antar sesama warga diharapkan dapat membantu menekan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Di Indonesia penduduk miskin masih menghantui masalah pembangunan. Dimana kebijakan pembangunan lebih mementingkan aspek pertumbuhan daripada aspek pemerataan. Sebagai contoh, pembangunan secara terus menerus hanya dilakukan di kawasan Pulau Jawa dan Bali sedangkan masih banyak daerah terpencil di Indonesia bagian timur yang masih diabaikan. Berbagai program dan kebijakan yang telah dibuat pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan seperti Inpres Desa Tertinggal (IDT), Penanggulangan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi, Beras

⁶ Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.201

Miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sebagainya sampai saat ini belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2015 angka penduduk miskin mencapai 28,59 juta orang atau setara dengan 11,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka kemiskinan tersebut bertambah 0,86 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan September 2014 yang sebesar 27,73 juta orang atau setara dengan 10,96%.

Kemiskinan sesungguhnya tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi saja, tetapi banyak aspek lain yang mempengaruhinya. Kemiskinan juga disebabkan lemahnya aspek moral, sosial, dan juga aspek budaya serta kebijakan pembangunan yang belum merata. Logikanya, orang miskin umumnya pendapatan kecil dan tidak menentu. Pendapatan yang kecil ini disebabkan oleh kemampuan SDM-nya yang rendah, tidak memiliki modal usaha, atau tidak memiliki *networking* dalam berwirausaha.

Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui ditingkatkannya Sumber Daya Manusia (SDM) melalui: penguatan untuk memberdayakan, dan kegiatan pemberdayaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.⁷

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Istilah pemberdayaan ini telah demikian populer sebagai suatu pendekatan yang dilakukan untuk memperkuat masyarakat baik secara sosial dan ekonomi agar dapat merubah serta memperbaiki posisi mereka ketika berhadapan dengan kondisi perekonomian/kebutuhan rumah tangga yang sangat berpengaruh secara fisik dan psikis. Inti dari pemberdayaan adalah bagaimana masyarakat mempunyai posisi tawar sehingga menjadi pelaku proses pembangunan yang partisipatif dan aktif bukan hanya sebagai objek pembangunan.

Melalui kegiatan pemberdayaan, individu dan masyarakat disadarkan akan potensi, kebutuhan, dan masalah yang ada pada diri dan lingkungannya. Selanjutnya, mereka didorong untuk mau melakukan perubahan yang dimulai dari dalam dirinya. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil yang mudah dan bisa dilakukan individu dan lingkungannya. Tahapan selanjutnya adalah penguatan dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan sehingga perubahan itu akan meningkat. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan latihan serta pendampingan.

⁷ Parsons, et. al. 1994. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014) h.59

Pelatihan kewirausahaan merupakan suatu langkah penting dan perlu dilakukan dalam rangka membentuk/mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan akhir yang ingin dicapai yaitu program pelatihan ini akan berdampak dalam meningkatkan keterampilan bidang usaha dan mempunyai sikap jiwa kewirausahaan dan harapan akan mampu menciptakan kemandirian baik dalam sikap maupun dalam usaha.

Salah satu lembaga keswadayaan yang bergerak dalam bidang pengembangan masyarakat terutama untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). PKBM merupakan suatu wadah yang menyediakan informasi dan kegiatan belajar sepanjang hayat bagi setiap warga masyarakat agar mereka lebih berdaya.⁸

PKBM juga menyelenggarakan pendidikan berkelanjutan bagi warga sehingga pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam bidang pendidikan, pendapatan, kesehatan, lingkungan hidup, agama, seni, budaya. PKBM juga merangsang kemandirian warga yang memungkinkan mereka berkontribusi terhadap pembangunan yang terjadi dilingkungan masyarakat bahkan pada prmbangunan bangsa.⁹

Sebagai sebuah pusat pembelajaran (*learning centre*), PKBM dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menitik beratkan swadaya, gotong royong, dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Pusat pembelajaran (*learning centre*) memiliki fungsi yang dijadikan acuan dalam membangun PKBM yang lebih optimal, fungsi-fungsi tersebut berhubungan satu dengan

⁸*Panduan Penyelenggaraan Pusat akaegiatan Belajar Masyarakat* (Bandung: Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) Jayagiri, 2003), h.1

⁹*Ibid*, h.2

yang lain secara terpadu. Fungsi-fungsi merupakan karakteristik dasar yang harus menjadi acuan pengembangan kelembangaan PKBM sebagai wadah pembelajaran masyarakat. Beberapa fungsinya yaitu: sebagai tempat masyarakat belajar (*learning society*) sebagai tempat tukar belajar (*learning exchange*), sebagai pusat informasi dan bacaan masyarakat (TBM), sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat dan sebagai pusat penelitian masyarakat (*community research center*) terutama dalam pendidikan nonformal.

PKBM salah satu lembaga pendidikan nonformal yang memiliki filosofi yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat. Diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. PKBM salah satu mitra kerja pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui program-program pendidikan nonformal. Diharapkan melalui PKBM mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*), sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidik, dan inofasi dalam keterampilan dalam rangka meningkatkan kehidupan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Harapan Bangsa I yang terletak di Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling merupakan sebuah lembaga yang lahir dari pemikiran tentang kesadaran pentingnya kedudukan masyarakat dalam proses pembangunan pendidikan nonformal, oleh sebab itu PKBM ditengah-tengah masyarakat sangat membantu dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui dunia pendidikan. PKBM memiliki

beberapa macam program Pendidikan Kecakapan Wirausaha, tujuan dari kegiatan ini memberikan penyuluhan dan pelatihan dengan metode pendidikan orang dewasa (andragogi) kepada para peserta tentang bagaimana cara mengukur, membuat pola dan teknik menjahit dengan benar.

Menurut salah satu anggota PKBM yang mengikuti program PKW ini, dengan adanya program pelatihan ini sangat membantu masyarakat untuk belajar menjahit dan menjadi bekal untuk usaha sendiri ke depannya. Karena jika belajar menjahit diluar memerlukan biaya sedangkan jika mengikuti program PKW di PKBM Harapan Bangsa I ini tidak dikenakan biaya.¹⁰

Aktifitas kewirausahaan, merupakan suatu komponen ekonomi dan merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, maka penulis mencoba untuk menganalisis proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada proses pemberdayaan masyarakat melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) untuk mengembangkan potensi masyarakat dan memperbaiki kehidupan dibidang ekonomi, dan mengkaji lebih lanjut terhadap tema tersebut serta dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di PKBM Harapan Bangsa I Kelurahan Sumberejo Kecamatan Kemiling Bandar Lampung”

¹⁰ Dwi, anggota PKBM Harapan Bangsa I, wawancara tanggal 10 November 2019

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dipaparkan di atas, maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung?”

E. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di Kecamatan Kemiling Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan keilmuan dalam memberikan pemahaman-pemahaman mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).
2. Secara Praktis diharapkan untuk memberi masukan pada Institusi dan organisasi Masyarakat setempat untuk membantu daerah daerah tertentu untuk lebih mandiri dengan pemberdayaan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Di dalam penelitian diperlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan, mengingat bahwa tidak setiap permasalahan yang diteliti tentu saja berkaitan dengan kemampuan si peneliti, biaya dan lokasi. Pertimbangan tersebut mutlak diperlukan, dan penelitian tidak dapat diselesaikan dengan sembarang metode penelitian.¹¹

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, agar dapat mendukung kesempurnaan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut Kartini Kartono jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas apa yang tengah terjadi pada masyarakat. Penelitian lapangan pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹²

¹¹ Soebagyo, Joko. 1997. Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta : PT. Rineka Cipta, h.109

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h.32

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan di analisis diinterpretasikan dan kemudian disimpulkan.¹³

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila peneliti melakukan penelitian terhadap populasi yang besar namun peneliti memiliki keterbatasan teknik pengambilan sampel, sehingga generalisasi kepada populasi yang diteliti.¹⁵ Dari populasi yang diteliti agar lebih spesifik perlu diadakan objek pemilihan objek secara khusus yang akan diteliti, dalam hal ini adalah

¹³Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011) h.106

¹⁴ Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h.110

¹⁵ Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, h.118

sampel penelitian. Untuk itu diperlukan Teknik sampling (cara yang digunakan untuk mengambil sampel).¹⁶

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam pengambilan sample adalah Teknik *purposive sampling*. Teknik ini merupakan teknik penentu sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁷ Dalam penelitian ini data yang diharapkan dapat terkumpul adalah mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) di PKBM Harapan Bangsa I.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 10 orang yang terdiri dari ibu rumah tangga produktif dan remaja putus sekolah yang umurnya produktif.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Secara luas, observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi disini diartikan lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan.¹⁸

Dalam penelitian ini observasi yang penulis gunakan adalah observasi nonpartisipan yaitu dimana peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang diteliti, peneliti hanya sebagai pengamat dan hanya berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan

¹⁶ Sutriono Hadi, Metodologi Research, jilid 1, Yogyakarta, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM,1973) h.3

¹⁷ Sugiyono. 2012. Metode *Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).h.117

¹⁸Ibid, h.69

digunakan untuk menggali data terkait aktivitas peran pemberdayaan masyarakat melalui program PKW.

Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengamati kegiatan masyarakat, partisipasi masyarakat yang ada dilokasi penelitian dalam pemberdayaan masyarakat melalui PKBM Harapan Bangsa I.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).¹⁹ Dalam hal ini wawancara yang penulis gunakan adalah teknik interview bebas terpimpin yaitu penginterview membaca kerangka pertanyaan untuk disajikan dan irama interview sama sekali diserahkan kepada penginterview.

Penulis menggunakan metode ini karena penulis mengharapkan data yang dibutuhkan akan dapat di peroleh secara langsung sehingga kebenarannya tidak akan di tanyakan lagi karena data yang diperoleh oleh penulis data yang ditanyakan kepada partisipan PKBM Harapan Bangsa I.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan kepada subjek penelitian.²⁰ Dokumen yang diteliti

¹⁹Tanzeh, Ahmad "Metode Penelitian Praktis(Yogyakarta:Teras,2011)h. 89

²⁰Ibid, h.70

dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan menjadi *dokumen primer*, jika dokumen ini ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa; dan *dokumen sekunder*, jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya oleh orang lain. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.

d. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, berikutnya penulis menggunakan analisis data dengan permasalahan, mencari, menjelaskan upaya atau langkah langkah apa saja yang di lakukan PKBM Harapan Bangsa I untuk meningkatkan kualitas pekerja yang tergabung dalam PKBM Harapan Bangsa I.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. *Miles and Huberman* mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas yaitu dengan cara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi atau kesimpulan.²¹

²¹Etta Mamang Sangadji, *Op.Cit*, h199

Yang mana cara menganalisisnya menggambarkan kata-kata atau kalimat sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif untuk menarik kesimpulan dari data yang diperoleh yaitu berangkat dari fakta atau peristiwa yang kongkrit dan umum yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak. Data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara.

2. Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rincinya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks, atau grafiks sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan, kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau

juga matrik. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan masih bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih “dalam” (*grounded*), maka perlu dicari, data lain yang baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan.²²

Setelah beberapa tahapan analisis data dilakukan maka tahap berikutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari fakta-fakta yang khusus dari peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus itu ditarik mempunyai sifat umum. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa berfikir induktif itu berasal dari peristiwa yang khusus kemudian menarik kesimpulan yang umum. Metode ini penulis maksudkan untuk melihat fakta fakta yang terjadi di PKBM Harapan Bangsa I.

²²Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) , h.10.

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN WIRAUSAHA (PKW)

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

¹ Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu, h.223

Pemberdayaan dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu “*empowerment*”² yang berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuatan. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam beberapa hal sebagai berikut:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka meningkatkan pendapatan dan memperoleh pendapatan dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi proses.²

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks itu sendiri diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan

²Edi Suharto. 1996. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009). h.58.

menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.³

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁴

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.⁵

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk

³Kartasasmitta. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta)h. 94-95

⁴Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,), h.42.

⁵ Ibid, h.58

memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan social.⁶

Berdasarkan definisi pemberdayaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.⁷

Adapun cara yang di tempuh dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan memberikan pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) berupa motivasi atau dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, meningkatkan kesadaran tentang potensi yang di milikinya, kemudian berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki tersebut.

⁶ Ibid, h.60

⁷ Ibid, h.60

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil)⁸

Ada beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:

- a. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis.
- b. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak, dan remaja penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing.
- c. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi atau keluarga.⁹

Menurut Agus Syafi'i, tujuan pemberdayaan masyarakat adalah mendirikan masyarakat atau membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara seimbang. Karena pemberdayaan masyarakat adalah upaya memperluas horizon pilihan bagi

⁸ Soerjono Soekanto, 1987. *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press,), Cet. Ke-2, h.75

⁹ Edi Suharto, *Op.Cit.*, h.60

masyarakat. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya.¹⁰

Payne mengemukakan bahwa suatu proses pemberdayaan (empowerment), pada intinya bertujuan: membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menemukan tindakan yang akan ia lakukan yang berkaitan dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.¹¹

Mengacu kepada konsep-konsep di atas, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*) dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang baik. Perbaikan, pendidikan lebih pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metoda, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan , penerima manfaat; tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar yang dilakukan melalui seumur hidup;

¹⁰ Agus Ahmad Syafi, Op.Cit.,h. 39

¹¹ Soerjono Soekanto,1987. *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawaliipress,), Cet. Ke @2, h.60

2. Perbaiki aksesibilitas (*better accessibility*) dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/ inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran;
3. Perbaiki tindakan (*better action*) dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik;
4. Perbaiki kelembagaan (*better institution*) dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha;
5. Perbaiki usaha (*better business*) perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan;
6. Perbaiki pendapatan (*better income*) dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya;
7. Perbaiki lingkungan (*better environment*) perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas;

8. Perbaiki kehidupan (*better living*) tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat;
9. Perbaiki masyarakat (*better community*) keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.¹²

3. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Isbandi Rukminto Adi, pemberdayaan masyarakat memiliki 7 (tujuh) terhadap pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan, yaitu: pertama, penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community woker*, dan kedua penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif.
- b. Tahapan pengkajian (*assessment*): pada tahapan ini yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki klien.

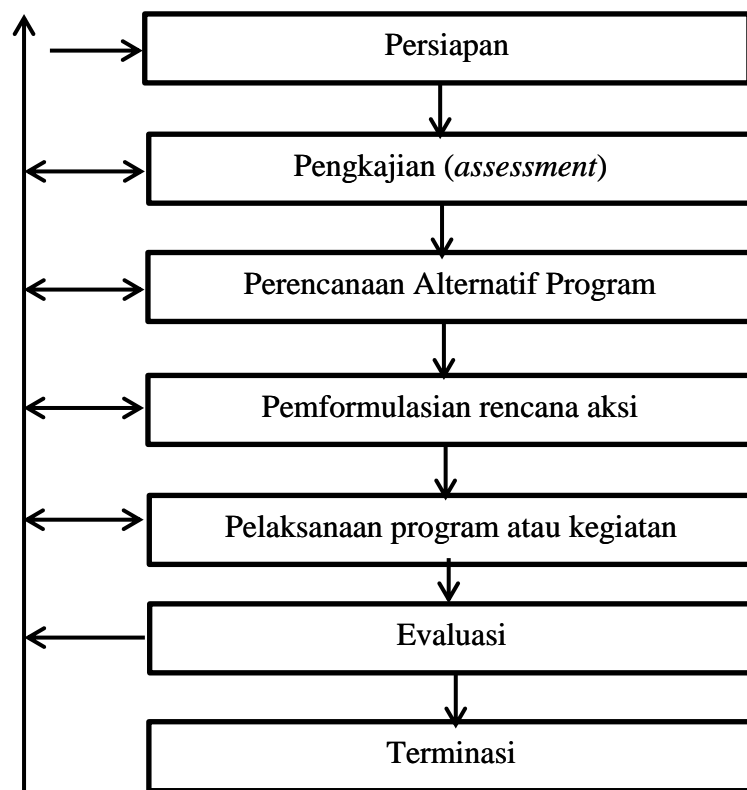
¹² Mardikanto, Totok dan Poerwoko, 2015, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta)h.109-110

- c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan: pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. rupa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
- d. Tahap pemfomalisasi rencanaaksi: pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peren masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
- e. Tahap evaluasi: evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga dengan keterlibatan Warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengewasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

- f. Tahap terminasi: tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti.¹³

Bagan 1

Tahapan Pemberdayaan Masyarakat¹⁴



Sumber: Adi Isbandi Rukminto

Menurut Ayub M. Padangaran pengembangan masyarakat merupakan proses penguatan pemberi kemandirian dan keberadaan masyarakat, tahapan dalam pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk

¹³Mardikanto, Totok dan Poerwoko, 2015, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik, (Bandung:Alfabeta)h.63

¹⁴ Adi Isbandi Rukminto, *Op. Cit*, h.54

memaksimalkan segala sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah agar bisa dimanfaatkan secara optimal, tahapan pemberdayaan antara lain¹⁵:

1. Tahap Penyadaran, yaitu tahap dimana masyarakat diberi pencerahan dan dorongan untuk menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk mempunyai kapasitas dan menikmati sesuatu yang lebih baik.
2. Tahap pengkapasitasan (*capacity building*), atau memampukan (*enabling*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi pengetahuan, keterampilan, fasilitas, organisasi, dan sistem nilai atau aturan main.
3. Tahap Pendayaan (*empowerment*), yaitu tahap dimana masyarakat diberi kesempatan atau otoritas untuk menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah mereka miliki untuk mengurus dan mengembangkan diri mereka sendiri.

Tahapan yang sesuai dengan study dalam penelitian ini adalah tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan tahap pendayaan, dimana Ayub.M. Padangaran dalam bukunya menganggap bahwa pengembangan masyarakat merupakan proses penguatan pemberi kemandirian dan keberadaan masyarakat, tahapan dalam pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk memaksimalkan segala sumber daya yang ada dan dimiliki oleh suatu daerah agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

¹⁵ Ayub M. Padangaran, *Op.Cit*, h.31

Lebih lanjut, menurut penulis Pada Tahap penyadaran merupakan tahap persiapan dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini dilakukan pencerahan seperti motivasi yang dilakukan oleh pihak pemberdaya (PKBM Harapan Bangsa I), mereka berusaha menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi keberlangsungan proses pemberdayaan yang efektif. Hal tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk mengangkat kesadaran mereka tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Kemudian pada tahap Pengkapasitasan, setelah remaja tersebut sudah menyadari bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik kemudian diupayakan agar mereka menjalani proses belajar dan diberikan kemampuan seperti pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang dimiliki relevansi dengan apa yang menjadi tuntutan kebutuhan hidup. Tahap ketiga adalah tahap pengayaan atau peningkatan intelektual dan kecakapan keterampilan yang diperlukan. Mereka diberikan kesempatan untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk dikembangkan dikembangkan potensi pada diri mereka sehingga akan bertambahnya wawasan untuk dapat membentuk kemampuan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

4. Strategi Pemberdayaan

Parsons et.al. menyatakan bahwa proses pemberdayaan yang umumnya dilakukan secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur menyatakan bahwa proses pemberdayaan terjadi dalam relasi satu lawan satu antara pekerja sosial dan klien dalam setting pertolongan perseorangan. Meskipun pemberdayaan seperti ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak semua intervensi pekerjaan sosial dapat dilakukan melalui kolektivitas. Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual; meskipun pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan klien dengan sumber atau sistem lain di luar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*): mikro, mezzo, dan makro.

1. Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai Pendekatan yang Berpusat pada Tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai

media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi Sistem Besar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi Sistem Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.¹⁶

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan dan Pemeliharaan (Suharto)¹⁷:

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.

¹⁶ Parsons, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez (1994), *The Integration of Social Work Practice*, California: Brook/Cole, h.55

¹⁷ Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS), h.64

2. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Dubois dan Miley memberi beberapa cara atau teknik yang lebih spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat¹⁸:

1. Membangun relasi pertolongan yang: (a) merefleksikan respon empati; (b) menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri (*self-determination*); (c) menghargai perbedaan dan keunikan individu; (d) menekankan kerjasama klien (*client partnerships*).
2. Membangun komunikasi yang: (a) menghormati martabat dan harga diri klien; (b) mempertimbangkan keragaman individu; (c) berfokus pada klien; (d) menjaga kerahasiaan klien.
3. Terlibat dalam pemecahan masalah yang: (a) memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses pemecahan masalah; (b) menghargai hak-hak klien; (c) merangkai tantangan-tantangan sebagai kesempatan belajar; (d) melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi.
4. Merefleksikan sikap dan nilai profesi pekerjaan sosial melalui: (a) ketaatan terhadap kode etik profesi; (b) keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan perumusan kebijakan; (c) penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi ke dalam isu-isu publik; (d) penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan kesempatan.

¹⁸ Dubois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon, h.90

B. Pendidikan *Life Skills* Dalam Dimensi Kewirausahaan

1. Pengertian *Life Skills*

Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life Skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.¹⁹ Menurut World Health Organization (WHO) dalam *Life Skills Education in Schools* *Life Skill* adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidupnya sehari-hari secara efektif²⁰.

Sedangkan Menurut Anwar menyatakan bahwa : *Life Skill* adalah kemampuan psikososial dari seseorang yaitu kemampuan yang diperlukan untuk berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain atau masyarakat lingkungan dimana ia berada, *Life skills* diartikan sebagai kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan psikososial seseorang untuk mengatasi berbagai tuntutan dan tantangan hidup sehari-hari, kemampuan seseorang untuk mempertahankan kesejahteraan mentalnya dengan baik melalui kemampuan beradaptasi dengan orang lain, budaya, dan lingkungannya. Terdapat sejumlah keterampilan yang merupakan keterampilan dasar

¹⁹ Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3

²⁰ WHO Programme on Mental Health, *Life Skills Education in Schools*, WHO, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, Geneva, 1997, h.1

antara lain keterampilan dalam mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stress yang merupakan bagian dari pendidikan²¹.

2. Pendidikan Kewirausahaan pada Lembaga Kursus

Pendidikan Kewirausahaan pada Lembaga Kursus Secara garis besar ada dua pola umum penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan pada lembaga kursus, yaitu: (1) pola terintegrasi, yang penyelenggaraannya terintegrasi dengan bahan belajar keterampilan kejuruan, dan (2) pola terpisah atau khusus, yaitu diberikan secara khusus dalam satu paket keterampilan atau satu paket kursus secara khusus (Ahmad)²².

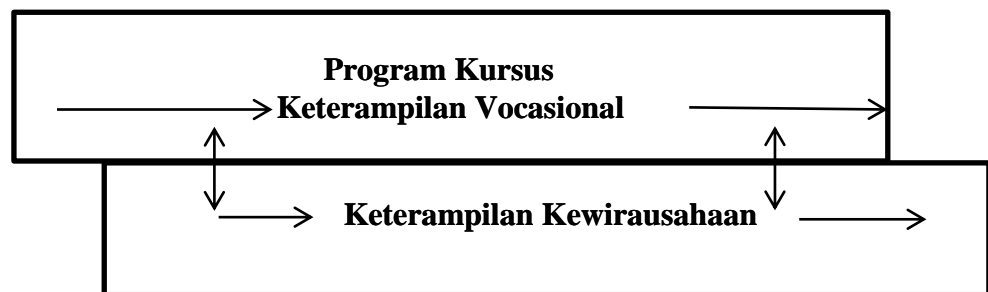
a. Pola Terintegrasi

Pola terintegrasi adalah pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang diprogramkan dan dilaksanakan secara simultan dengan pelajaran vokasional. Pada situasi ini bahan belajar tentang kewirausahaan disajikan dalam dua cara, yaitu *pertama* secara melebur pada seluruh bahan belajar vokasional, dan yang *kedua* disajikan tersendiri sebagai mata ajaran tersendiri. Bahan belajar kewirausahaan yang disajikan secara melebur, menyatu, dan simultan pada bahan belajar kursus dan

²¹ Anwar, 2015. *Pendidikan Kecakapan Hidup*, Alfabeta, Bandung,.h.54

²² Ahmad A. 2001. *Model Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewiraswastaan bagi Wanita pada Lembaga Kursus*. Disertasi Doktor pada PPs UPI Bandung, tidak diterbitkan.

tidak tertulis serta terprogram dengan tujuan kurikuler biasa disebut sebagai kurikulum kewirausahaan tesembunyi (*hidden curriculum*). Sedangkan bahan belajar pendidikan kewirausahaan yang disajikan secara terpisah dan definitif bisa disebut sebagai kurikulum positif pendidikan kewirausahaan atau bisa juga disebut sebagai *appear curriculum*. Apabila divisualkan pola pendidikan kewirausahaan terintegrasi itu seperti berikut ini.

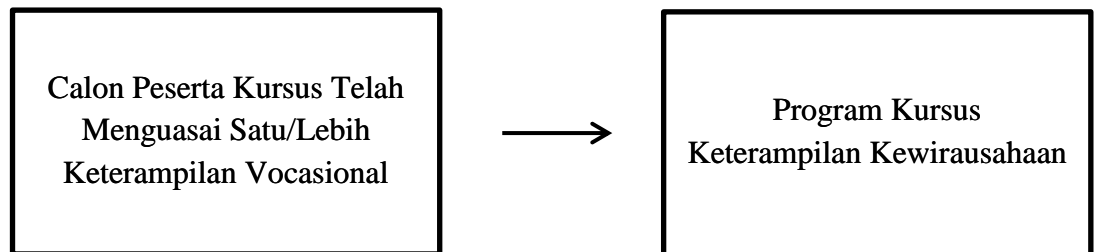


Bagan 2. Pola Pendidikan Kewirausahaan Terintegrasi

b. Pola Terpisah

Pola terpisah adalah pembelajaran pendidikan kewirausahaan yang diprogramkan dan dilaksanakan secara tersendiri dalam satu kesatuan program kursus. Biasanya pendidikan kewirausahaan terpisah ini diselenggarakan setelah peserta kursus menguasai seperangkat kemampuan vokasional. Mereka membutuhkan kemampuan tambahan untuk "menjual" kemampuan itu sehingga bisa menghasilkan uang. Pada situasi ini, bahan belajar tentang kewirausahaan disajikan secara positif atau menampak sebagai bahan belajar definitif.

Apabila divisualkan pola pendidikan kewirausahaan terpisah itu digambarkan berikut.



Bagan 3. Pola Pendidikan Kewirausahaan Terpisah

c. Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan Pada Lembaga Kursus

Secara garis besar ada lima kompetensi yang perlu dikembangkan melalui poses pembelajaran. *Pertama*, adalah kemampuan yang berhubungan dengan sikap mental dan motivasi. *Kedua*, kemampuan manajerial. *Ketiga*, kemampuan teknis produksi. *Keempat*, kemampuan permodalan dan keuangan. *Kelima*, kemampuan pemasaran dan jaringan usaha. Dari kelima kemampuan tersebut kemampuan teknis produksi adalah identik dengan kemampuan keterampilan vokasional.

Komponen terpenting dari kemampuan kewirausahaan adalah pada sikap mental dan motivasi. Tetapi memiliki kemampuan sikap mental dan motivasi kewirausahaan saja tidaklah memadai bila tidak memiliki empat kemampuan lainnya. Dengan demikian, untuk mengembangkan kemampuan wirausaha perlu mengukur kembali tingkat kemampuan dari masing-masing kompetensi tersebut pada diri peserta. Pada setiap

kelompok kompetensi tersebut masih dapat dikembangkan sub-sub kemampuan yang lebih rinci. Sebaliknya, bila hendak disederhanakan, dari kelima kemampuan tersebut bisa dikelompokkan menjadi tiga golongan besar yaitu: (1) sikap mental dan motivasi (2) kemampuan vokasional, dan (3) kemampuan manajerial.

Berangkat dari tiga kemampuan dasar tersebut berikut adalah salah satu kemungkinan jabaran program belajar untuk mengembangkan kewirausahaan, khususnya yang diturunkan (diderivasi) dari dua kemampuan dasar kewirausahaan, yakni sikap mental, motivasi, serta kemampuan manajerial.²³

- a. Pendekatan
- b. Pengorganisan Peserta Kursus
- c. Pengorganisasian Tujuan dan Bahan Belajar
- d. Metode Pembelajaran
- e. Alokasi Waktu dan Distribusinya
- f. Dana Belajar
- g. Tempat Belajar dan Sarana Pendukungnya
- h. Alat dan Media Pembelajaran
- i. Prosedur Kronologis Pelaksanaan Pembelajaran
- j. Sumber/narasumber Belajar
- k. Alat Evakuasi
- l. Iklim Sosial Pembelajaran

²³ Anwar, 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup*, Alfabeta, Bandung,.h.96

C. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

1. Pengertian PKBM

Pada awal pendiriannya PKBM merupakan pusat seluruh kegiatan belajar masyarakat dalam rangka peningkatan pengetahuan, keterampilan/keahlian, hobi atau bakatnya yang dikelola dan diselenggarakan tentang Pusat sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masalah-masalah pendidikan masyarakat serta kebutuhan akan pendidikan masyarakat, definisi PKBM terus disempurnakan, terutama disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan lembaga, sasaran, kondisi daerah serta model pengelolaannya.²⁴

Beberapa definisi lain dari antaranya adalah, UNESCO memberikan definisi : PKBM yang teridentifikasi di Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah sebuah lembaga pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal diarahkan untuk masyarakat pedesaan dan perkotaan dengan dikelola oleh masyarakat itu sendiri serta memberi kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan berbagai model pembelajaran dengan tujuan mengembangkan kemampuan dan keterampilan masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya.²⁵

²⁴ Imam Prihadiyoko, Juni 2001, Kompas.

²⁵ UNESCO, 1998. *Learning to Be* (Prepared by Faure, E. Et al), Paris: UNESCO

Umberto Sihombing, menyebutkan PKBM adalah sebuah model pelebagaan yang diartikan, bahwa PKBM sebagai basis pendidikan masyarakat, dikelola secara professional oleh sehingga LSM atau organisasi kemasyarakatan lainnya, masyarakat dengan mudah dapat berhubungan dengan PKBM dan tentang berbagai program informasi pendidikan meminta masyarakat, persyaratannya, dan jadwal pelaksanaannya. Pelebagaan artinya menempatkan PKBM sebagai basis penyelenggaraan program pendidikan masyarakat di tingkat operasional (desa/kelurahan). Program pendidikan masyarakat yang selama ini terpisah-pisah dan dilaksanakan di berbagai tempat seperti di rumah penduduk, gedung sekolah, balai desa, dan tempat lainnya serta berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya, diupayakan untuk dipusatkan di PKBM.²⁶

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa PKBM adalah sebuah lembaga pendidikan yang dikembangkan dan dikelola oleh masyarakat serta diselenggarakan di luar sistem pendidikan formal baik di perkotaan maupun di pedesaan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan belajar kepada seluruh lapisan masyarakat agar mereka mampu membangun dirinya secara mandiri sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Sehingga dengan definisi tersebut, PKBM berperan sebagai tempat pembelajaran masyarakat terhadap berbagai pengetahuan

²⁶ Sihombing, Umberto.2001. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,)

atau keterampilan dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan potensi yang ada di sekitar lingkungannya (desa, kota), agar masyarakat memiliki keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup.

2. Konsep PKBM

Pendidikan nonformal dalam implementasi program-programnya memiliki model satuan pengelolaan kelembagaan yang sangat bervariasi. Model-model satuan yang dibangun sangat bergantung kepada kebutuhan program, kepentingan pengembangan program. Besar kecil model satuan pengelolaan kelembagaan serta luasnya sasaran yang dikembangkan sangat ditentukan oleh kemampuan pengembang (provider) dalam memahami jenis-jenis program yang akan dibangun. Sasaran didik dan Beberapa model satuan pengelolaan kelembagaan yang sudah sejak lama ada dalam konsep pendidikan nonformal yang asli (*indigenous*) diantaranya adalah pesantren. Meskipun pada saat ini pesantren sudah ada juga yang menyatu dengan pendidikan formal. Model pengelolaan kelembagaan lainnya di antaranya adalah kelompok belajar, majlis ta'lim, lembaga kursus, lembaga pelatihan dan pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM.²⁷

Pusat kegiatan belajar masyarakat atau dikenal dengan sebutan PKBM, merupakan sebuah lembaga pendidikan yang lahir tentang kesadaran pentingnya kedudukan pemikiran masyarakat dalam proses

²⁷ Pasal 26 Ayat (3) UU Sisdiknas No. 20/2003

pembangunan pendidikan nonformal, Oleh sebab itu berdirinya PKBM di tengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjadi tulang punggung bagi terjadinya proses pembangunan melalui pemberdayaan potensi-potensi yang ada di masyarakat.

PKBM sebagai salah satu mitra kerja pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat (bangsa) melalui program-program pendidikan nonformal, diharapkan mampu menumbuhkan masyarakat belajar (*learning society*) sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kemandirian, keberdayadidikan, dan inovatif dalam mencari berbagai informasi baru dalam rangka meningkatkan kehidupannya. Sebagai sebuah pusat pembelajaran (*learning centre*), PKBM dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dengan menitik beratkan swadaya, gotong-royong dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Terutama berkaitan dengan pentingnya peningkatan kemampuan, keterampilan atau kecerdasan anggota masyarakat. Ketika pendidikan nonformal dijadikan sebagai sebuah strategi dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat, maka PKBM tampil sebagai salah satu wadah dalam mewujudkan program-program pendidikan dan keterampilan yang terpadu dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat. Baik program pendidikan yang diqulirkan pemerintah, khususnya program-program pendidikan nonformal yang dilahirkan oleh kebijakan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan/atau mengembangkan program pendidikan yang secara khusus lahir dan diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia PKBM lahir sekitar pertengahan tahun 1970-an, dengan tujuan memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang dirancang berbasis pada masyarakat. Konsep kelembagaan pua kegiatan belajar masyarakat (PKBM) pertama kali digulirkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Perkembangan PKBM terus meningkat apalagi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda kawasan negara-negara Asia sekitar pertengahan tahun 1990-an. Pada tahun 1998 perkembangan PKBM semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya kebutuhan layanan pendidikan masyarakat melalui pendidikan nonformal, juga dipicu oleh berbagai persoalan yang melingkupi bidang pendidikan dan ekonomi khususnya dalam bidang pendidikan nonformal.

Persoalan-persoalan tersebut meliputi; meningkatnya masyarakat rawan daya beli, meningkatnya jumlah penduduk miskin, tingginya angka buta huruf, masalah-masalah dalam realisasi pendidikan dasar 9 tahun melalui pendidikan nonformal, tingginya angka putus sekolah (*drop out*) SD, SMP dan SMA, tingginya angka tidak melanjutkan, kebutuhan pendidikan keterampilan (*life skill*) bagi orang dewasa, dan berbagai kebutuhan layanan pendidikan yang tidak bisa dilayani melalui pendidikan formal.

Berdasar pada peran dan fungsi PKBM, maka PKBM dianggap sebagai salah satu pusat layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Pada saat ini ada

sekitar 3.064 PKBM yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia (Depdiknas).²⁸ Namun demikian melihat jumlah PKBM yang ada dibandingkan dengan besarnya persoalan sosial, ekonomi dan pendidikan yang harus diselesaikan, jumlah tersebut sangat kecil dan tidak memadai.

Untuk itulah PKBM sebagai sebuah lembaga (organisasi swadaya) yang mengedapankan belajar masyarakat dan belajar sepanjang hayat serta mengembangkan budaya belajar seyogyanya berjalan secara profesional dan didirikan tidak hanya berdasar untuk menyerap atau menerapkan program-program yang digulirkan pemerintah. Akan tetapi PKBM benar-benar merupakan wujud dari sebuah lembaga pembelajaran masyarakat yang utuh.

3. Tujuan dan Tugas-tugas PKBM

Ada tiga tujuan penting dalam rangka pendirian dan pengembangan PKBM: (a) memberdayakan masyarakat agar mampu mandiri (berdaya), (b) meningkatkan kualitas hidup masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi, (c) meningkatkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang terjadi di lingkungannya sehingga mampu memecahkan permasalahan tersebut. Sihombing menyebutkan, bahwa tujuan pelem- bagaan PKBM adalah untuk menggali, menumbuhkan, mengem- bangkan, dan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat, untuk sebesar-besarnya pemberdayaan masyarakat itu sendiri.²⁹

²⁸ Depdiknas, 2006

²⁹ Sihombing, Umbreto. 1999. *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Mahkota, h.56

Tujuan pemberdayaan disini dalam arti memberdayakan seluruh potensi dan fasilitas pendidikan yang ada di desa sebagai masyarakat yang diarahkan untuk upaya membelajarkan mendukung pengentasan kemiskinan (miskin pendidikan dan miskin ekonomi), dengan prinsip pengembangan dalam rangka mewujudkan demokrasi bidang pendidikan.³⁰ Pada sisi lain tujuan PKBM adalah untuk lebih mendekatkan proses pelayanan pendidikan terutama pelayanan pembelajaran yang dipadukan dengan berbagai tuntutan, masalah-masalah yang terjadi di sekitar lingkungan proses masyarakat itu sendiri.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan itulah maka partisipasi, dan tanggungjawab masyarakat terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup PKBM merupakan hal yang paling utama.

4. Fungsi PKBM

Peran serta masyarakat dalam pendidikan nonformal dapat dilakukan melalui PKBM. Melalui pendidikan yang dilakukan di PKBM, masyarakat diharapkan dapat memberdayakan dirinya. Seperti diuraikan pada bagian awal tulisan ini program pendidikan nonformal yang diselenggarakan melalui PKBM diprakarsai sendiri oleh masyarakat. Ada yang dikelola perorangan, perusahaan, lembaga kursus, pesantren, LSM, dan masyarakat lainnya. Fasli menyebutkan secara tegas fungsi PKBM adalah: (a) tempat pusan berbagai potensi yang ada dan berkembang di masyarakat, (b) sebagai sumber informasi yang andal bagi masyarakat

³⁰ <http://www.pkbm-harapan.or.id>

yang membutuhkan keterampilan fungsional, (c) sebagai tempat tukar-menukar berbagai pengetahuan dan keterampilan fungsional di antara warga masyarakat.³¹

Kegiatan yang dilakukan dalam PKBM tidak hanya dirancang untuk mengembangkan berbagai program pendidikan nonformal, tetapi juga menampung kegiatan dari sektor lain yang terkait. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat nonformal dalam penyelenggaraan program pendidikan sesungguhnya berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat. Beberapa program unggulan yang dikembangkan PKBM sebagai usaha nyata dari masyarakat untuk membantu pemberantasan buta huruf. Khususnya dalam rangka membantu menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun seperti: Program kelompok belajar paket A setara SD dan kelompok belajar paket B setara keaksaraan SLTP (*Equivalency Education*), juga program fungsional.

Pusat kegiatan belajar masyarakat dalam pengembangan program-programnya, terutama dalam membangun dan mengembangkan program pembelajarannya secara ideal harus mampu memadukan unsur keilmuan dan wirausaha. Unsur keilmuan (akademik) diharapkan mampu membantu menambah wawasan dan pengetahuan warga belajar, sedangkan unsur wirausaha dapat membentuk jiwa makarya (*entrepreneur*). Melalui bekal tersebut diharapkan, pada saat terjun ke masyarakat, warga belajar tidak memiliki kemampuan secara hanya kemampuan untuk melihat berbagai

³¹ Fasli Jalal dan Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adecitra Karya Nusa, h.60

kemungkinan atau berbagai akademik tetapi juga peluang yang ada dan terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan keahlian (kompetensinya). Misalnya berkaitan dengan kemampuan akses pasar, mencari pesanan (order), dan masuk ke berbagai sumber dana yang ada di masyarakat.

Berdasar pada peran ideal PKBM ada beberapa fungsi yang dapat dijadikan acuan, di mana fungsi-fungsi tersebut berhubungan satu sama lain secara tepadu. Di mana fungsi-fungsi tersebut merupakan karakteristik dasar yang harus menjadi acuan pengembangan kelembagaan PKBM sebagai wadah pembelajaran masyarakat.

Pertama, sebagai tempat masyarakat belajar (*learning society*), PKBM merupakan tempat masyarakat memperoleh berbagai ilmu pengetahuan dan bermacam ragam keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhannya, sehingga masyarakat berdaya dalam meningkatkan kualitas hidup dan kehidupannya.

Ke dua, sebagai tempat tukar belajar (*learning exchange*), PKBM memiliki fungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran berbagai informasi (pengalaman), ilmu pengetahuan dan keterampilan antar warga belajar, sehingga antara warga belajar yang satu dengan yang lainnya bisa saling mengisi. Sehingga setiap warga belajar sangat dimungkinkan dapat berperan sebagai sumber belajar bagi warga belajar lainnya (masyarakat lainnya).

Ke tiga, sebagai pusat informasi atau taman bacaan sebagai TBM. PKBM masyarakat (perpustakaan) masyarakat, harus mampu berfungsi sebagai bank informasi, artinya PKBM dapat dijadikan tempat menyimpan berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan secara aman dan kemudian disalurkan kepada seluruh masyarakat atau warga belajar yang membutuhkan. Di samping itu pula, pengelola, tutor dan warga belajar dituntut untuk mengembangkan berbagai pengetahuan dan keterampilan secara inovatif, melalui pengkajian dan pencarian berbagai informasi baru (mutakhir) baik dalam hal model-model maupun model-model pembangunan masyarakat pembelajaran lainnya. Sehingga fungsi PKBM sebagai taman bacaan masyarakat menjadi lebih berarti, karena masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi baru.

Ke empat, sebagai sentra pertemuan berbagai lapisan masyarakat, fungsi PKBM dalam hal ini, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pengelola dengan sumber belajar dan warga belajar, akan tetapi PKBM berfungsi sebagai komponen masyarakat (tokoh tempat berkumpulnya seluruh masyarakat, organisasi masyarakat, aparat pemerintah daerah pengusaha/swasta, dokter LSM dll), dalam berbagai bidang sesuai dengan kepentingan, masalah dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan azas dan prinsip belajar masyarakat atau pengembangan pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning dan lifelong education*).

Ke lima, sebagai pusat penelitian masyarakat (*community research centre*) terutama dalam pengembangan pendidikan nonformal, PKBM berfungsi sebagai tempat menggali, mengkaji, menelaah (menganalisa) berbagai persoalan atau permasalahan dalam bidang pendidikan nonformal dan keterampilan baik yang berkaitan dengan program yang dikembangkan di PKBM maupun berkaitan dengan program-program lain yang selaras dengan azas dan tujuan PKBM. Fungsi kelima harus disesuaikan dengan permasalahan dan sumberdaya yang dimiliki PKBM, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya penunjang lainnya.

D. Pemberdayaan Masyarakat Melalui PKBM

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal.

PKBM sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan unit yang sangat penting dalam pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan program pendidikan nonformal.³²

Sihombing menjelaskan, bahwa PKBM merupakan salah satu alternatif yang dapat dipilih dan dijadikan ajang pemberdayaan masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran bahwa dengan melembagakan PKBM, akan banyak potensi yang selama ini tidak tergalikan akan dapat digali, ditumbuh-

³² Ibid, h.63

dimanfaatkan dan didayagunakan melalui pendekatan-pendekatan budaya yang persuasif.³³

Kontribusi pendidikan nonformal masyarakat, secara lebih jelas dapat dilihat dari definisi dan hakekat peran pendidikan nonformal itu sendiri. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan terdahulu nampak adanya beberapa kesamaan peran pendidikan nonformal dan pendidikan sosial dalam memberdayakan masyarakat. Kesamaan peran tersebut dapat dilihat dari: (a) hakekat pendidikan nonformal adalah dilakukan di luar sistem membelajarkan masyarakat yang pendidikan formal, (b) kegiatan pembelajaran dalam pendidikan nonformal merupakan aktivitas yang disengaja dan diorganisasi secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu, (c) sesuai dengan fungsi pendidikan nonformal sasarannya adalah semua warga masyarakat dalam membantu membelajarkan (pemerataan pendidikan), dan (d) bertujuan memberikan bekal pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan pengembangan sumberdaya manusia sebagai modal pembangunan nasional.

Sudjana secara lebih tegas menerangkan tugas pendidikan nonformal adalah: (a) membelajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan di masa depan, dan (b)

³³ Sihombing, Umberto.2001. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah* (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa),h.45

membelajarkan warga belajar agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumberdaya alam guna meningkatkan taraf hidupnya.³⁴

Sejalan dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Kindervatter (1979), memberi peran secara jelas tentang pendidikan nonformal dalam rangka proses pemberdayaan (*empowering process*), peran pendidikan nonformal tidak saja mengubah individu, tetapi juga kelompok, organisasi dan masyarakat. Pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan mengandung arti luas, yakni mencakup peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan pengembangan kemampuan lainnya ke arah kemandirian hidup. Kindervatter (1979: 13) menjelaskan bahwa: peran pendidikan nonformal sebagai proses pemberdayaan di dalamnya meliputi peningkatan dan perubahan sumberdaya manusia sehingga mampu membangun masyarakat dan lingkungannya.³⁵

LaBelle mengartikannya sebagai strategi perubahan sosial. Strategi-strategi yang ditawarkan LaBelle merupakan sebuah penguatan bagi penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal saat ini terutama daya dukungannya terhadap pemberdayaan masyarakat dan pembangunan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal perlu dirancang melalui berbagai pendekatan. Berikut ini diuraikan tentang bagaimana pendekatan-pendekatan tersebut dapat dilakukan dalam proses pengembangan pendidikan nonformal.

³⁴ Sudjana, D., 2000. *Pendidikan Luar Sekolah*, Sejarah, Azas.

³⁵ Kindervatter, S., 1979. *Pemberdayaan Masyarakat (Empowering Process)*

- Pendekatan yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat. Artinya pendidikan nonformal senantiasa harus dikembangkan dan dibangun berdasarkan pada kebutuhan yang ada di masyarakat.
- Pendekatan dengan cara menggunakan dan menggali apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
- Sikap yang perlu diciptakan pada setiap orang atau setiap warga belajar agar percaya diri atau memiliki sikap mandiri.
- Pendekatan yang memperhatikan dan mempertimbangkan aspek lingkungan.³⁶

Salah satu tujuan PKBM adalah, meningkatnya kualitas hidup masyarakat atau warga belajar dari sisi ekonomi atau meningkatnya pendapatan (*income generating*). Maka salah satu dikembangkan PKBM yang adalah kelompok belajar usaha. Melalui proses belajar usaha, kemandirian warga belajar (masyarakat) dalam mengembangkan keterampilan berusaha atau dalam mengembangkan jiwa makarya program (*entrepreneurship*) akan mudah tercapai.

Melalui program kejar usaha diharapkan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kemampuan warga belajar akan semakin bertambah atau semakin meningkat. Terutama bagi warga belajar yang belum memiliki sumber mata pencaharaan tetap dan berpenghasilan rendah. Program kelompok belajar usaha diperuntukan bagi masyarakat (warga belajar) yang

³⁶ La belle, Thomas J. (1976). *Nonformal Education and Social Change in Latin America*. Los Angeles: UCL A Latin American Center Publications & University of California.

minimal telah bebas buta aksara dan atau selesai program kesetaraan paket A, juga masyarakat lainnya yang merasa perlu untuk meningkatkan dan memperoleh pengetahuan serta keterampilan baru. Warga belajar di kelompok belajar usaha dapat memilih berbagai alternatif jenis keterampilan dan jenis usaha yang akan dikembangkan dalam kelompoknya sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Jumlah anggota kelompok yang dipersyaratkan dalam PKBM adalah 3-5 orang, boleh juga dilakukan secara individual (sendiri-sendiri) tetapi masih dalam satu ikatan kelompok. Setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang fasilitator/tutor atau lebih. Jenis-jenis usaha yang dikembangkan dalam kelompok belajar usaha yang termasuk dan dikembangkan dalam PKBM di antaranya adalah: hasil kerajinan tangan industri rumah tangga (*home industry*), usaha berbagai jenis makanan ringan (kerupuk, keripik), peternakan dan perikanan, usaha pertanian sayuran, buah-buahan, taman/bunga, usaha pakaian jadi, dan berbagai usaha lainnya yang sesuai dengan kebutuhan rumah tangga.

Berikut ini digambarkan jenis usaha program kecakapan wirausaha yang dikembangkan warga belajar dalam PKBM. Beberapa jenis usaha dikembangkan pada sejumlah PKBM yang teridentifikasi pada tahun (2006), jenis kerajinan tangan menduduki ranking pertama atau sekitar 31,3 %, pada posisi kedua jenis usaha lain sebanyak 18, jenis usaha ini biasanya digolongkan pada usaha-usaha jasa dan makanan atau jenis-jenis kerajinan asli daerah seperti lukisan, kerajinan perak, kerajinan kulit, souvenir dan berbagai jenis pakaian jadi dll. Pada posisi ketiga adalah kelompok usaha

makanan ringan sebanyak 12,5 % dan buah-buahan sebesar 9.4 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi masyarakat Indonesia masih menjadi primadona pengembangan program kecakapan wirausaha pada PKBM. Namun demikian jenis usaha yang memiliki tingkat persaingan tinggi dengan dunia internasional belum banyak dikembangkan, kecuali jenis-jenis kerajinan tangan asli daerah untuk souvenir dengan ciri khas daerah (unik).

E. Teori *Behavioristik*

Sebagai proses pembelajaran harus selalu fokus kepada kebutuhan masyarakat guna berdaya dan memperbaiki kualitas hidupnya. Untuk mengoptimalkan potensi dan sumberdaya masyarakat serta diusahakan guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan. Hadirnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan salah satu bagian dari pendidikan nonformal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan sepanjang hayatnya. Adanya kesempatan yang diperoleh masyarakat untuk mengikuti proses belajar diharapkan masyarakat mampu dalam mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang ada pada dirinya sekalipun ia mengalami keterbatasan. Setelah masyarakat mengikuti proses pembelajaran yang diselenggarakan, masyarakat diharapkan menghasilkan perubahan perilaku yang diinginkan. Perubahan perilaku yang diinginkan tersebut kemudian bisa diamati oleh fasilitator menandakan bahwa proses belajar yang diikuti masyarakat atau warga belajar itu berperan pada kehidupannya untuk mandiri.

Proses pembelajaran dengan teori Behavioristik menjelaskan tentang perubahan perilaku pada seseorang yang dapat diamati, diukur secara nyata, perubahan yang terjadi merupakan hasil dari rangsangan (stimulan) yang menimbulkan hubungan perilaku (respon). Teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena seluruh perilaku manusia adalah hasil belajar.

B.F Skinner mendefinisikan belajar sebagai proses perubahan perilaku. Skinner meyakini bahwa perilaku dikontrol melalui proses operant conditioning. Dimana operant conditioning merupakan proses perubahan perilaku yang dicapai sebagai hasil belajar melalui proses penguatan perilaku yang baru muncul. Penguatan ini yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan.³⁷

Teori belajar Skinner adalah teori yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon setelah diberi stimulan terhadap lingkungan, dan pengalaman akan membentuk perilaku mereka. Menurut teori ini hal terpenting dalam belajar adalah penguatan, pengetahuan yang terbentuk melalui stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan.³⁸

Skinner membagi penguatan menjadi dua yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif dapat meningkatkan terjadinya

³⁷ Sugihartono, et. Al. *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2007), h. 97.

³⁸ Rifnon Rizaini, "Studi atas Pemikiran B.F. Skinner Tentang Belajar". *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran dasar*, Vol. 1 No. 1 (Juni 2014), h. 128.

pengulangan tingkah laku itu, sedangkan penguatan negatif dapat mengurangi bahkan menghilangkan tingkah laku tersebut. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, apresiasi, dan lain-lain, sedangkan bentuk-bentuk penguatan negatif antara lain punishment seperti tidak memberi apresiasi, memberi tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang. Dimana penguatan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat apabila diberi penguatan. Adapun pendekatan pada behavioristik yakni:

1. Menganggap Kesadaran Itu Penting Untuk Perubahan Perilaku.

Teori ini pada hakikatnya menganggap membangun kesadaran pada warga belajar itu penting dalam proses perubahan perilaku. Karena pada saat proses perubahan perilaku awalnya dibutuhkan kesadaran bagi para warga belajar agar timbulnya keinginan untuk melakukan proses belajar.

2. Perubahan Perilaku harus Diusahakan dengan Proses Belajar atau Belajar Kembali.

Dengan timbulnya keinginan tersebut perubahan perilaku harus diusahakan dengan proses belajar atau belajar kembali. Jika individu ingin adanya perubahan pada dirinya maka ia harus mempunyai usaha melalui proses pembelajaran atau belajar kembali untuk penguatan perilaku yang dahulunya sempat hilang karena penundaan belajar pada tahap sebelumnya, guna memiliki perubahan perilaku yang diinginkan. Dibangunnya kesadaran dan harus adanya usaha belajar pada penyandang

tunanetra sangat dibutuhkan pada saat memulai proses pembelajaran Al-qur'an Braille guna penyandang tunaetra memiliki pemahaman atas pembelajaran yang dilakukan dan menghasilkan perilaku yang diinginkan.

3. Behavioristik ini fokusnya pada perilaku tertentu yang dirubah itu bisa diamati.
4. Pendekatan behavioristik ini berawal dari keyakinan bahwa perilaku individu adalah suatu hasil proses belajar.
5. Individu mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri disebabkan individu telah belajar perilaku yang salah, dengan teori behavioristik ini perilaku yang salah dapat diganti diganti dengan perilaku yang benar melalui suatu proses belajar.

Behavioristik ini menekankan perhatian pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati setelah seseorang diberi perlakuan. Dimana pada penelitian ini warga belajar yang awalnya belum terlihat perubahan tingkah laku dan belum mendapatkan penguatan kapasitas untuk dirinya, kemudian diberi penguatan kapasitas, dibekali skill atau keterampilan hingga ia merasakan ada yang berbeda dari sebelumnya. Yang awalnya ia membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan atau membutuhkan sesuatu, kini ia bisa mandiri dan bisa memberdayakan dirinya sendiri maupun para masyarakat lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Isbandi Rukminto, *Op. Cit.*

Ahmad A. 2001. *Model Kurikulum dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewiraswastaan bagi Wanita pada Lembaga Kursus*. Disertasi Doktor pada PPs UPI Bandung, tidak diterbitkan.

Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Anwar, 2006. *Pendidikan Kecakapan Hidup*, Alfabeta, Bandung.

Anwar, 2015. *Pendidikan Kecakapan Hidup*, Alfabeta, Bandung.

Aprillia, Theresia, NTP dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. (Surakarta: Alfabeta, 2014).

DadangKahmad, *MetodePenelitian Agama*, (Bandung: PustakaSetia, 2000).

Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat(LPPM) Universitas

Depdiknas, 2006

Dubois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*. Boston: Allyn and Bacon

Edi Suharto. 1996. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama,2009).

Fasli Jalal dan Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adecitra Karya Nusa

Kartini Kartono, *PengantarMetodelogiRisetSosial*, (Bandung: MandarMaju, 1996).

Karya Sobahi. Cucu, Suhana “*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendidikan di Era Otonomi Daerah*.” (Bandung: Cakra, 2011).

Kartasasmita. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung:Alfabeta).

- Kindervatter, S., 1979. *Pemberdayaan Masyarakat (Empowering Process)*
- La belle, Thomas J. (1976). *Nonformal Education and Social Change in Latin America*. Los Angeles: UCL A Latin American Center Publications&University of California.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, (Bandung:Alfabeta).
- Panduan Penyelenggaraan Pusat akaegiatan Belajar Masyarakat* (Bandung: Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BP-PLSP) Jayagiri, 2003).
- Parsons,et.al.1994.*Pemberdayaan Masyarakat*.(Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Parsons, Ruth J.,James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez (1994), *The Integration of Social Work Practice*, California:Brook/Cole.
- Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3
- Petunjuk Teknis Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW), (Jakarta:Kementrian Pendidikandan Kebudayaan Direktorat Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional mengakui bahwa PKBM adalah Satuan Pendidikan Non Formal.
- Sihombing, Umberto.2001. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa,)
- Sihombing, Umberto.2001. *Konsep dan Pengembangan Pendidikan Berbasis Masyarakat* dalam Fasli Jalal dan Dedi Supriadi (Eds.), Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah (Cet. I; Yogyakarta: Adicita Karya Nusa)
- Sihombing, Umbreto. 1999. *Pendidikan Luar Sekolah Kini dan Masa Depan*. Jakarta: Mahkota.
- Soebagyo, Joko. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo. Persada

Soerjono Soekanto, 1987. *Sosial Suatu Pengantar*, (Jakarta, Rajawali Press,), Cet. Ke 2.

Sudjana, D., 2000. *Pendidikan Luar Sekolah*, Sejarah, Azas.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Suharto, Edi (1997), *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).

Sutriyono Hadi, *Metodologi Research*, jilid 1, Yogyakarta, (Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1973)

Tanzeh, Ahmad "Metode Penelitian Praktis (Yogyakarta: Teras, 2011)

UNESCO, 1998. *Learning to Be* (Prepared by Faure, E. Et al), Paris: UNESCO

WHO Programme on Mental Health, Life Skills Education in Schools, WHO, Division of Mental Health and Prevention of Substance Abuse, Geneva, 1997,

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, Cetakan ke-3, 2011)

Zubaedi, 2007. *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media)

<http://www.pkbm-harapan.or.id>